

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini persaingan di dunia usaha semakin kompetitif yang mengharuskan suatu perusahaan menentukan kebijakan yang mampu mendukung kemajuan semua elemen yang ada di perusahaan yang bersangkutan serta mengembangkan usaha yang mereka jalankan agar tetap bertahan dan berkembang serta mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Selain itu didirikannya suatu perusahaan bukan tak lain bertujuan untuk mendapatkan laba jangka panjang yang semaksimal mungkin sesuai dengan rencana awal didirikannya perusahaan tersebut. Dengan begitu, diharapkan manajemen sebagai pihak yang mengelola perusahaan mampu membuat keputusan – keputusan yang menunjang kemajuan perusahaan yang bersangkutan sehingga dengan kemajuan perusahaan tersebut akan mendapatkan laba maxsimal sehingga mampu mensejahterakan para pemegang saham yang ada di perusahaan tersebut.

Menurut Suad (2008) dalam Wati (2014), 3 keputusan yang dapat diambil oleh seorang manajer keuangan perusahaan antara lain: keputusan pembagian laba/dividen, keputusan pendanaan (untuk mendapatkan dana penggunaan) dan keputusan investasi (dalam hal penggunaan dana perusahaan). keputusan pendanaan yang sangat terkait erat dengan kebijakan dividen. Kebijakan dividen yaitu kebijakan perusahaan dalam pengelolaan perolehan laba

di akhir periode akuntansi setiap tahunnya yang dihadapkan pada 2 alternatif yaitu ditahan untuk menambah modal guna pembayaran investasi atau dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham (Martono dan Agus Harjito, 2005 dalam Wati, 2014). Sinyal perusahaan yang menggunakan dividen bagi perusahaan dengan kinerja yang tidak begitu baik akan dirasa sangat mahal karena sulitnya pengambil keputusan untuk membagi dividen ini (Amihud dan Li, 2002 dalam Sumartha, 2016). Oleh sebab itu, berbagai faktor yang menjadi penentu bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan dividen harus sangat diperhatikan.

Ketetapan manajemen dalam pembagian dividen ini akan mempengaruhi harga dan nilai saham serta para kesejahteraan investor. Oleh sebab itu, bila jumlah dividen yang besar dapat dibayar oleh suatu perusahaan kepada para investornya, maka secara otomatis dapat menarik banyak investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Hidayati (2006) dalam Kardianah, dkk (2013), para investor lebih menyukai dividen yang dibagikan berbentuk tunai, karena dapat meminimalkan investasi yang tidak pasti dalam perusahaan itu. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pembayaran dividen yang stabil dapat meminimalisir profitabilitas perusahaan yang tidak pasti, sehingga manajemen perusahaan seharusnya dapat mempertimbangkan pentingnya stabilitas dividen. Walaupun demikian, ada kalanya para investor menginginkan sesuatu yang tidak sepemikiran dengan pengelola perusahaan atau jajaran manajer perusahaan. Ini menjadi masalah keagenan yang sangat kontras terjadi sebab adanya kepentingan yang berbeda antara dua pihak tersebut. Manajemen seringkali memutuskan

sesuatu yang bukan kepentingan dan kesejahteraan para pemegang saham melainkan untuk dirinya sendiri yang dimana hal tersebut sangat tidak disukai oleh para pemegang saham. Agar dapat mengurangi permasalahan tersebut para manajer sebagai pengelola perusahaan diharapkan mampu memberikan yang terbaik untuk para pemegang saham dalam hal tersebut mampu memberikan laba yang maksimal serta meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, apabila ada kelebihan arus kas dalam perusahaan maka sebagian dana tersebut diberikan kepada para pemegang saham dengan pemberian dividen yang tinggi. Dengan begitu maka akan menarik banyak investor lainnya untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.

Sistem kendali perusahaan sangat ditentukan oleh struktur kepemilikan saham (Adhi A.W. 2002 dalam Rachmad dan Muid, 2013). Struktur kepemilikan adalah perbandingan/proporsi kepemilikan saham oleh manajemen dan institusi (Sugiarto, 2009 dalam Wati, 2014).

Menurut Darminto (2008) dalam Bansaleng, dkk (2014) menyatakan bahwa struktur kepemilikan dikelompokkan kedalam 2 bagian yaitu 1) struktur kepemilikan manajerial (mayoritas saham dimiliki para manajer perusahaan) dan 2) Struktur kepemilikan institusional (mayoritas saham dimiliki oleh institusi eksternal). Adanya struktur kepemilikan institusional akan mengurangi segala bentuk pelanggaran oleh para manajer perusahaan karena dapat meningkatkan fungsi pengawasan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Firmanda, dkk (2015) yang mengemukakan jika kepemilikan institusional secara positif signifikan mempengaruhi kebijakan dividen. Artinya, tingginya tingkat saham institusional

mampu mengintensifkan segala upaya pengawasan yang akan memberikan batas bagi para manajer untuk tidak berperilaku *opportunistic*, yaitu pelaporan perolehan laba untuk meningkatkan kepentingan pribadi manajer secara oportunis (Scott 2000 dalam Firmanda, dkk 2015). Selain itu dengan manajemen memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan maka manajemen terkait diharapkan tidak membuat suatu keputusan yang dianggap mampu merugikan pihak pemegang saham. Serta berpedoman pada tujuan awal perusahaan tersebut yaitu mampu memberikan kemakmuran yang semaksimal mungkin kepada para pemegang saham.

Penelitian Wati (2014) menyatakan bahwa struktur kepemilikan manajerial secara positif mempengaruhi kebijakan dividen. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ratih (2010) dalam Wati (2014) memperlihatkan jika semakin besarnya keikutsertaan jajaran manajemen perusahaan dalam kepemilikan perusahaan akan menjadikan tingginya pembayaran dividen. Ini dikarenakan saat manajer mengoperasionalkan suatu perusahaan maka manajer akan merasa memiliki perusahaan dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Faktor lain yang mempengaruhi dibuatnya kebijakan dividen adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan sendiri menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan total aktiva yang dimiliki. Besarnya perusahaan ditentukan oleh besarnya rasio dividen yang dibayarkan (Kartika, 2005 dalam Wati, 2014). Selain itu, ukuran perusahaan yang besar merupakan sebuah keunggulan karena memiliki tingkat kapitalisasi yang tinggi dan lebih mudah menarik investor untuk berinvestasi pada saham yang dikeluarkan (Lopolusi,

2013). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bagiana, dkk (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Menurutnya ukuran perusahaan yang besar merupakan sebuah keunggulan karena memiliki tingkat kapitalisasi yang tinggi dan akan lebih mudah menarik investor untuk berinvestasi pada saham yang dikeluarkan. Perusahaan-perusahaan dengan ukuran yang lebih besar mempunyai peluang yang lebih besar untuk membayar dividen dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil.

Faktor lain yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah kebijakan hutang. Kebijakan hutang sendiri merupakan kebijakan yang diambil perusahaan untuk melakukan pembiayaan melalui hutang. Kebijakan hutang sering diukur dengan *debt ratio* (Firmanda, dkk 2015). Menurut Wati, (2014), risiko yang ditimbulkan oleh hutang akan mempengaruhi pengurangan arus kas dan dividen yang dibayarkan oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu mengenai mendapatkan hasil yang variatif. Penelitian yang dilakukan Kardianah, dkk (2013) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmanda, dkk (2015) mengemukakan jika kepemilikan institusional secara positif signifikan mempengaruhi kebijakan dividen. Artinya, tingginya tingkat saham institusional dapat memaksimalkan pengawasan dalam membatasi tindakan manajer yang *opportunistic*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wati, (2014) dalam penelitiannya memperlihatkan jika struktur kepemilikan

manajerial secara positif mempengaruhi kebijakan dividen. Hal tersebut didukung oleh penelitian Karina dan Darsono, (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham manajerial memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kebijakan dividen. Kardianah, dkk (2013) menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal tersebut didukung oleh penelitian Bagiana, dkk (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.

Rachmad dan Muid, (2013) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal tersebut didukung oleh penelitian Wati, (2014) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lopolusi, (2013) menyatakan bahwa ukuran badan usaha/perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen. Pengaruh negatif ini terjadi karena apabila ukuran perusahaan mengalami kenaikan maka akan menyebabkan penurunan terhadap kebijakan dividen. Bansaleng, dkk (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara simultan kebijakan hutang mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan *food and beverages*. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati, (2014) menyatakan bahwa keputusan hutang berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, Hal tersebut didukung oleh penelitian Firmanda, dkk (2015) yang menyatakan bahwa kebijakan hutang secara negatif signifikan mempengaruhi kebijakan dividen. Sebab tingginya penggunaan hutang sangat terkait erat dengan rendahnya pemberian dividen.

Melihat ketidakkonsistensinan di antara beberapa penelitian diatas menjadikan hal yang menarik bagi penulis untuk dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Sumartha, (2016) dengan struktur kepemilikan sebagai variabel independen, serta kebijakan dividen sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian berikut dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumartha, (2016) adalah sebagai berikut : (1). Ditambahkan variabel ukuran perusahaan karena masih terjadi ketidakkonsistensinan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Bagiana, dkk (2016) dan Kardianah, dkk (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan Lopolusi, (2013) menyatakan sebaliknya yaitu ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen. Penambahahan ukuran perusahaan dengan asumsi bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan maka akan semakin besar pula dalam menghasilkan laba dan akan berdampak pada pembagian dividen yang semakin besar (2). Ditambahkan Variabel kebijakan hutang karena masih terjadi ketidak konsistenannya pada penelitian Wati, (2014) memperlihatkan jika keputusan hutang secara negatif mempengaruhi kebijakan dividen. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan Bansaleng, dkk (2014) memperlihatkan jika secara simultan kebijakan hutang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan *food and beverages*. Penambahan variabel kebijakan hutang dengan asumsi bahwa perusahaan melakukan kebijakan hutang untuk menambah biaya operasional perusahaan, dengan harapan operasional perusahaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, akan tetapi jika perusahaan mendapat laba yang tinggi, pemegang

saham akan mendapatkan dividen yang kecil, karena sebagian besar pendapatan dicadangkan untuk pelunasan hutang.

1.2.Rumusan Masalah

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah penentuan kebijakan dividen perusahaan. Kebijakan dividen suatu perusahaan berbeda dengan perusahaan lainnya. Keputusan perusahaan dalam membagikan dividen perusahaan akan berpengaruh terhadap pemegang saham karena dividen yang dibagikan oleh manajemen merupakan bentuk kesejahteraan bagi pemegang saham. Oleh sebab itu, manajemen dalam menetapkan kebijakan dividen akan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu.

Kebijakan pembayaran dividen adalah suatu keputusan terpenting oleh perusahaan terkait dengan perencanaan investasi perusahaan di masa depan. Perencanaan investasi ditujukan untuk mengetahui berapa banyak dividen dari perolehan laba bersih yang dibagikan dan perolehan laba bersih yang ditahan untuk diinvestasikan kembali. (Fama dan French, 1998 dalam Rachmad dan Muid, 2013).

Struktur kepemilikan pada penelitian ini terbagi menjadi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Dimana, sistem kendali perusahaan sangat ditentukan oleh struktur kepemilikan saham (Adhi.A.W, 2002 dalam Muhammad, 2014). Jensen *et al.* (1992) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Penetapan dividen yang

rendah karena manajer memiliki harapan investasi dimasa mendatang yang dibiayai dari sumber internal.

Penelitian lain mengenai kepemilikan institusional menurut Rachmad dan Muid, (2013) mengemukakan jika kepemilikan institusional mempengaruhi dan mengendalikan secara efisien dari manajemen perusahaan sehingga masalah agensi di perusahaan menjadi berkurang. Jadi, disimpulkan tingginya kepemilikan institusional pada perusahaan akan memperkecil permasalahan agensi sehingga memperkecil pula pembagian dividen.

Ukuran perusahaan yang besar merupakan sebuah keunggulan karena memiliki tingkat kapitalisasi yang tinggi dan lebih mudah menarik investor untuk berinvestasi pada saham yang dikeluarkan (Lopolusi, 2013). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bagiana, dkk (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Faktor lain yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah kebijakan hutang. Kebijakan hutang sendiri merupakan kebijakan yang diambil perusahaan untuk melakukan pembiayaan melalui hutang. Kebijakan hutang sering diukur dengan *debt ratio* (Firmanda, dkk 2015). Menurut Wati (2014), risiko yang ditimbulkan oleh hutang akan mempengaruhi pengurangan arus kas.

Berdasarkan beberapa teori diatas, dilakukannya penelitian ini untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan manajerial mempengaruhi kebijakan dividen?
2. Apakah kepemilikan institusional mempengaruhi kebijakan dividen?
3. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi kebijakan dividen?

4. Apakah kebijakan hutang mempengaruhi kebijakan dividen?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris :

1. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen
2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen
4. Pengaruh kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam ilmu akuntansi dan pengembangan teori, terutama berkaitan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi sumber informasi tentang pentingnya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen.